

BAB 3

GAMBARAN UMUM KABUPATEN KLATEN

3.1. Kabupaten Klaten Selayang Pandang

Pemerintah Daerah Kabupaten Klaten dibentuk berdasarkan Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah, dan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-undang Nomor 12, 13, 14, dan 15 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah Kabupaten di Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Daerah Istimewa Yogyakarta.

Kabupaten Klaten memiliki visi untuk menciptakan Klaten yang *Toto Titi Tentrem Kerto Raharjo*. Sedangkan misi yang hendak diwujudkan adalah:

1. Mengupayakan terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat;
2. Mengupayakan rasa aman lahir dan batin serta tercukupinya kebutuhan materiil dan spirituil dan meningkatkan keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa;
3. Meningkatkan partisipasi masyarakat serta pelibatan masyarakat dalam mengaktualisasi diri dalam pembangunan;
4. Menumbuhkan perekonomian rakyat yang dinamis, berbasis sumber daya lokal dan berpikiran global untuk mengurangi angka kemiskinan serta menjaga kelestarian lingkungan hidup;
5. Penerapan pengarusutamaan gender dalam berbagai fungsi pemerintahan;
6. Mengembangkan kerjasama dengan berbagai pelaku pembangunan;
7. Mewujudkan tata pemerintahan yang baik yang didukung sumber daya yang memadai;
8. Mendorong pelaksanaan otonomi desa dengan menjadikan desa sebagai pusat-pusat pertumbuhan kawasan.

Kabupaten Klaten memiliki wilayah seluas 665,56km² dan secara administratif terbagi dalam 26 kecamatan dan 401 desa/kelurahan.

3.2. Kondisi Geografis Kabupaten Klaten

Secara geografis, Kabupaten Klaten terletak pada $110^{\circ}30'$ – $110^{\circ}45'$ Bujur Timur dan $7^{\circ}30'$ – $7^{\circ}45'$ Lintang Selatan. Disebelah utara berbatasan langsung dengan Kabupaten Boyolali, sebelah timur berbatasan langsung dengan Kabupaten Sukoharjo, di sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Gunung Kidul (DIY) dan di sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Sleman (Provinsi DIY). Kabupaten Klaten berada diantara 3 kota besar, yaitu Kota Yogyakarta (30km), Kota Surakarta (36km), dan Kota Semarang (100km), dan telah dihubungkan dengan jalur transportasi yang cukup memadai. Ketiga kota tersebut memiliki berbagai fasilitas berstandar internasional, seperti Bandar Udara Internasional Adi Sutjipto, Bandar Udara Internasional Adi Sumarmo, Bandar Udara Ahmad Yani, dan Pelabuhan Laut Tanjung Emas, yang tentu saja memberikan berbagai dampak terhadap pertumbuhan Kabupaten Klaten baik dari sisi ekonomi, sosial, budaya, pendidikan, kependudukan, maupun aspek lainnya.



Gambar 3.1 Peta Kabupaten Klaten

Sumber: www.klaten.go.id

3.3. Kondisi Topografi Kabupaten Klaten

Secara topografi, Kabupaten Klaten terletak diantara Gunung Merapi dan Pegunungan Seribu yang membagi Kabupaten Klaten menjadi 4 wilayah, yaitu:

- Wilayah dengan ketinggian <100 mdpal, meliputi Kecamatan Juwiring, Karangdowo dan Camas;
- Wilayah dengan ketinggian 100-200 mdpal, meliputi Kecamatan Prambanan, Jogonalan, Gantiwarno, Wedi, Bayat, Cawas (bagian barat), Trucuk, Kalikotes, Klaten Selatan, Klaten Tengah, Klaten Utara, Kebonarum (selatan), Ngawen (selatan dan timur), Ceper, Pedan, Karanganom (timur), Polanharjo (timur), Delanggu, Juwiring (barat), dan Wonosari (barat);
- Wilayah dengan ketinggian 200-400 mdpal, meliputi Kecamatan Manisrenggo, Jogonalan (utara), Karangnongko, Kebonarum (utara), Ngawen (utara), Jatinom, Karanganom (barat), Tulung, dan Polanharjo (barat);
- Wilayah dengan ketinggian 400-1000 mdpal, meliputi Kecamatan Kemalang, sebagian besa Manisrenggo, sebagian kecil Jatinom, dan sebagian kecil Tulung.

Kondisi tersebut memberikan gambaran tentang kondisi umum penyusun batuan, pola aliran air permukaan dan air tanah (hidrologi), yang selain menjadi kendala dalam dalam sistem transportasi dan komunikasi, tapi juga telah memberikan berbagai manfaat bagi Kabupaten Klaten. Keuntungan yang dimaksud disini adalah bervariasinya jenis tanaman pangan yang bisa tumbuh di wilayah Kabupaten Klaten dan banyaknya sumber daya air untuk irigasi, drainase, *domestic use* maupun kebutuhan air minum. Bahkan, potensi sumber daya air ini telah mampu memberikan pasokan air minum bagi masyarakat Kota Surakarta, lewat kerjasama dengan PDAM setempat.

3.4. Kondisi Demografi Kabupaten Klaten

Jumlah penduduk Kabupaten Klaten tahun 2008 adalah 1.300.494 jiwa, yang tersebar pada 26 wilayah kecamatan.

Tabel 3.1 Persebaran dan Kepadatan Penduduk Kabupaten Klaten Tahun 2008

| No | Kecamatan | Luas Wilayah (km ²) | Jumlah Penduduk (jiwa) | Jenis Kelamin | | Kepadatan per Wilayah (jiwa/km ²) |
|----|----------------|---------------------------------|------------------------|----------------|----------------|---|
| | | | | Pria | Wanita | |
| 1 | Prambanan | 24,43 | 49.277 | 23.563 | 25.714 | 2.017 |
| 2 | Gantiwarno | 25,64 | 40.994 | 19.530 | 21.464 | 1.599 |
| 3 | Wedi | 24,38 | 55.516 | 26.826 | 28.690 | 2.277 |
| 4 | Bayat | 39,43 | 63.852 | 31.231 | 32.621 | 1.619 |
| 5 | Cawas | 34,47 | 66.132 | 32.297 | 33.835 | 1.919 |
| 6 | Trucuk | 33,81 | 82.291 | 40.799 | 41.492 | 2.434 |
| 7 | Kalikotes | 12,98 | 37.389 | 18.372 | 19.017 | 2.881 |
| 8 | Kebonarum | 9,67 | 21.343 | 10.257 | 11.086 | 2.207 |
| 9 | Jogonalan | 26,70 | 57.877 | 28.820 | 29.057 | 2.168 |
| 10 | Manisrenggo | 26,96 | 41.766 | 20.125 | 21.641 | 1.549 |
| 11 | Karangnongko | 26,74 | 38.157 | 18.516 | 19.641 | 1.427 |
| 12 | Ngawen | 16,97 | 44.420 | 22.043 | 22.377 | 2.618 |
| 13 | Ceper | 24,45 | 63.835 | 31.411 | 32.424 | 2.611 |
| 14 | Pedan | 19,17 | 48.862 | 23.899 | 24.963 | 2.549 |
| 15 | Karangdowo | 29,23 | 51.020 | 25.196 | 25.824 | 1.745 |
| 16 | Juwiring | 29,79 | 61.216 | 29.945 | 31.271 | 2.055 |
| 17 | Wonosari | 31,14 | 62.663 | 30.108 | 32.555 | 2.012 |
| 18 | Delanggu | 18,78 | 44.516 | 22.075 | 22.441 | 2.370 |
| 19 | Polanharjo | 23,84 | 46.047 | 22.556 | 23.491 | 1.932 |
| 20 | Karanganom | 24,06 | 49.080 | 24.011 | 25.069 | 2.040 |
| 21 | Tulung | 32,00 | 54.576 | 26.781 | 27.795 | 1.706 |
| 22 | Jatinom | 35,53 | 57.338 | 27.919 | 29.419 | 1.614 |
| 23 | Kemalang | 51,66 | 34.681 | 17.075 | 17.606 | 671 |
| 24 | Klaten Selatan | 14,43 | 41.527 | 20.257 | 21.270 | 2.878 |
| 25 | Klaten Tengah | 8,92 | 43.878 | 21.379 | 22.499 | 4.919 |
| 26 | Klaten Utara | 10,38 | 42.241 | 20.537 | 21.704 | 4.069 |
| | Jumlah | 655,56 | 1.300.494 | 635.528 | 664.966 | 1.984 |

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Klaten dalam Klaten Dalam Angka 2008.

Persebaran penduduk menurut kecamatan paling banyak berada di Kecamatan Trucuk dengan penduduk sebanyak 82.291 jiwa (6,33%), sedangkan paling sedikit berada di kecamatan Kebonarum dengan penduduk sebanyak 21.343 jiwa (1,64%). Secara keseluruhan, tingkat kepadatan penduduk Kabupaten Klaten pada Tahun 2008 adalah 1.984 jiwa/km², dengan tingkat kepadatan paling tinggi di Kecamatan Klaten Tengah, yaitu 4.919 jiwa/km², dan paling rendah di Kecamatan Kemalang, yaitu 671 jiwa/km².

Berdasarkan tabel 3.1 diatas, dapat diketahui bahwa jumlah penduduk wanita lebih banyak dari penduduk pria dan kondisi ini telah berlangsung selama bertahun-tahun.

Tabel 3.2 Penduduk Kabupaten Klaten Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2004 – 2008

| No | Tahun | Jumlah Penduduk | | Jumlah Total |
|----|-------|-----------------|---------|--------------|
| | | Pria | Wanita | |
| 1 | 2004 | 625.173 | 656.613 | 1.281.786 |
| 2 | 2005 | 627.751 | 658.307 | 1.286.058 |
| 3 | 2006 | 631.231 | 662.011 | 1.293.242 |
| 4 | 2007 | 633.552 | 663.435 | 1.296.987 |
| 5 | 2008 | 635.528 | 664.966 | 1.300.494 |

Sumber: Klaten Dalam Angka Tahun 2008

Berdasarkan penelitian pada tahun 2007 yang dilakukan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan, bekerja sama dengan Bagian Sosial Sekretariat Daerah Kabupaten Klaten, didapatkan beberapa kesimpulan antarlain prosentase tenaga kerja migran wanita setiap tahunnya mengalami penurunan. Pada tahun 2005, perbandingan antara tenaga kerja migran wanita dan tenaga kerja migran pria adalah 23:77, dan pada tahun 2006 menjadi 10:90. Keadaan ini antara lain karena semakin banyak wanita yang lebih memilih bekerja tanpa bermigrasi, dengan alasan lebih

dekat dengan keluarga dan anak-anaknya. Hal ini menjadi salah satu penyebab mengapa penduduk wanita di Kabupaten Klaten lebih banyak daripada penduduk pria.

Kondisi semacam ini tidak jauh berbeda dengan kabupaten-kabupaten lain seperti Kabupaten Sukoharjo, Kabupaten Boyolali, dan Kota Surakarta. Di daerah-daerah tersebut jumlah penduduk wanitanya juga lebih banyak daripada penduduk prianya dengan rata-rata prosentase terbesar adalah Kota Surakarta yaitu sebesar 51,93%, diikuti dengan Kabupaten Klaten sebesar 51,18%, Kabupaten Boyolali sebesar 51,09%, dan Kabupaten Sukoharjo dengan prosentase sebesar 50,56%.

Keberhasilan pembangunan tidak bisa dilepaskan dari keberhasilan pembangunan manusia. Pembangunan manusia menuntut terjadinya pembangunan atas kemampuan manusia yang terjadi melalui perbaikan taraf kesehatan, pengetahuan dan ketrampilan, serta daya beli, sehingga memperoleh manfaat dalam hal produktivitas, pemerataan, pemberdayaan dan kesinambungan.

Indeks Pembangunan Manusia digunakan sebagai alat pemantauan pembangunan manusia, dan menjadi sangat penting dalam proses manajemen pembangunan, karena Indeks Pembangunan Manusia mampu menunjukkan dampak pembangunan yang dilakukan pada masa sebelumnya. Indeks ini juga dapat digunakan sebagai suatu ukuran yang mengaitkan antara pertumbuhan ekonomi dengan kualitas fisik untuk menggambarkan tingkat kualitas hidup dan kesejahteraan.

Tabel 3.3 Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Klaten Tahun 2006 – 2008

| No | Komponen | 2006 | 2007 | 2008 |
|----|----------------------------|-------|-------|-------|
| 1 | Indeks Harapan Hidup | 70,38 | 70,51 | 70,72 |
| 2 | Indeks Pendidikan | 75,02 | 75,02 | 77,77 |
| 3 | Indeks Kemampuan Daya Beli | 70,06 | 71,91 | 72,63 |
| | | 71,82 | 72,48 | 73,71 |

Sumber: Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Klaten Tahun 2008

IPM Kabupaten Klaten mengalami peningkatan setiap tahunnya, baik secara umum, maupun masing-masing komponennya. Hal ini dikarenakan keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran di bidang sosial budaya Kabupaten Klaten adalah untuk mengatasi permasalahan di bidang kependudukan, ketenagakerjaan, kesejahteraan sosial, pendidikan, kesehatan, dan peningkatan kualitas SDM. Komponen-komponen dalam Indeks Pembangunan Manusia selalu dijadikan sasaran program-program pemerintah, seperti misalnya program Jamkesda yang ditujukan untuk memberikan akses kesehatan yang lebih luas bagi masyarakat Kabupaten Klaten. Peningkatan sumber daya manusia sangat penting, karena pemerintah Kabupaten Klaten menyadari bahwa selain sebagai modal pembangunan, sumber daya manusia juga merupakan pelaku pembangunan.

Tabel 3.4 Perbandingan IPM se-eks Karesidenan Surakarta Tahun 2007

| No | Kabupaten/Kota | IPM | Rangking Regional | Rangking Nasional |
|----|----------------|-------|-------------------|-------------------|
| 1 | Klaten | 72,48 | 2 | 118 |
| 2 | Boyolali | 69,63 | 6 | 240 |
| 3 | Sukoharjo | 72,46 | 3 | 121 |
| 4 | Wonogiri | 70,11 | 5 | 218 |
| 5 | Sragen | 69,98 | 7 | 282 |
| 6 | Karanganyar | 71,59 | 4 | 159 |
| 7 | Surakarta | 76,58 | 1 | 20 |

Sumber: Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Klaten Tahun 2008

Apabila dibandingkan dengan daerah-daerah lain di sekitarnya, Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Klaten menduduki peringkat 2 di wilayah se-eks Karesidenan Surakarta.

3.5. Kondisi Infrastruktur Kabupaten Klaten

3.5.1. Sarana Kependidikan

Pendidikan merupakan indikator yang sangat penting dalam keberhasilan pembangunan karena sumber daya manusia yang berkualitas lewat pendidikan merupakan tujuan umum dari pembangunan. Oleh karena itu perlu diperlukan sarana dan prasarana pendidikan yang memadai untuk menunjang terciptanya sumber daya manusia yang berkualitas.

Tabel 3.5 Persebaran dan Sarana Pendidikan di Kabupaten Klaten Tahun 2008

| No | Kecamatan | Sekolah Negeri | | | | Jumlah | Sekolah Swasta | | | | Jumlah | Jumlah Negeri dan Swasta |
|----|--------------|----------------|-------|---------|--------|--------|----------------|-------|---------|--------|--------|--------------------------|
| | | TK | SD/MI | SMP/MTs | SMA/MA | | TK | SD/MI | SMP/MTs | SMA/MA | | |
| 1 | Prambanan | 0 | 32 | 3 | 2 | 37 | 30 | 1 | 1 | 1 | 33 | 70 |
| 2 | Gantiwarno | 0 | 26 | 4 | 1 | 31 | 27 | 2 | 2 | 1 | 32 | 63 |
| 3 | Wedi | 0 | 31 | 2 | 1 | 34 | 33 | 3 | 3 | 0 | 39 | 73 |
| 4 | Bayat | 0 | 36 | 3 | 1 | 40 | 36 | 4 | 3 | 2 | 45 | 85 |
| 5 | Cawas | 1 | 48 | 4 | 1 | 54 | 46 | 3 | 2 | 2 | 53 | 107 |
| 6 | Trucuk | 0 | 40 | 4 | 0 | 44 | 56 | 9 | 3 | 0 | 68 | 112 |
| 7 | Kalikotes | 0 | 21 | 1 | 0 | 22 | 18 | 3 | 0 | 0 | 21 | 43 |
| 8 | Kebonarum | 0 | 11 | 1 | 0 | 12 | 15 | 1 | 1 | 0 | 17 | 29 |
| 9 | Jogonalan | 0 | 31 | 2 | 1 | 34 | 37 | 1 | 2 | 2 | 42 | 76 |
| 10 | Manisrenggo | 0 | 28 | 3 | 0 | 31 | 28 | 4 | 2 | 0 | 34 | 65 |
| 11 | Karangnongko | 0 | 25 | 2 | 1 | 28 | 27 | 0 | 1 | 0 | 28 | 56 |
| 12 | Ngawen | 1 | 24 | 1 | 0 | 26 | 37 | 6 | 2 | 0 | 45 | 71 |
| 13 | Ceper | 0 | 35 | 4 | 1 | 40 | 48 | 11 | 2 | 2 | 63 | 103 |
| 14 | Pedan | 0 | 25 | 4 | 0 | 29 | 32 | 2 | 2 | 2 | 38 | 67 |
| 15 | Karangdowo | 0 | 33 | 4 | 1 | 38 | 33 | 5 | 2 | 0 | 40 | 78 |
| 16 | Juwiring | 0 | 36 | 2 | 0 | 38 | 41 | 9 | 3 | 1 | 54 | 92 |
| 17 | Wonosari | 0 | 41 | 4 | 1 | 46 | 50 | 1 | 2 | 1 | 54 | 100 |
| 18 | Delanggu | 0 | 29 | 5 | 0 | 34 | 29 | 3 | 3 | 3 | 38 | 72 |
| 19 | Polanharjo | 0 | 31 | 3 | 1 | 35 | 37 | 5 | 0 | 0 | 42 | 77 |
| 20 | Karanganom | 0 | 37 | 6 | 1 | 44 | 45 | 4 | 2 | 1 | 52 | 96 |
| 21 | Tulung | 0 | 34 | 4 | 0 | 38 | 38 | 0 | 1 | 0 | 39 | 77 |
| 22 | Jatinom | 0 | 38 | 4 | 1 | 43 | 48 | 1 | 1 | 1 | 51 | 94 |

(Sambungan)

| No | Kecamatan | TK | SD/ MI | SMP /MTs | SMA /MA | Jumlah | TK | SD/ MI | SMP/ MTs | SMA /MA | Jumlah | Jumlah Negeri dan Swasta |
|----|----------------|----------|------------|-------------|------------|------------|------------|-----------|-------------|------------|--------------|-----------------------------------|
| 23 | Kemalang | 0 | 28 | 2 | 0 | 30 | 18 | 0 | 3 | 0 | 21 | 51 |
| 24 | Klaten Selatan | 0 | 20 | 1 | 2 | 23 | 23 | 2 | 2 | 2 | 29 | 52 |
| 25 | Klaten Tengah | 0 | 20 | 4 | 0 | 24 | 29 | 5 | 3 | 6 | 43 | 67 |
| 26 | Klaten Utara | 0 | 15 | 4 | 3 | 22 | 31 | 6 | 4 | 7 | 48 | 70 |
| | Jumlah | 2 | 775 | 81 | 19 | 877 | 892 | 91 | 52 | 34 | 1.069 | 1.946 |

Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Klaten dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Klaten Tahun Anggaran 2008

Tabel 3.6 Perbandingan Rasio Murid per Kelas Tahun 2004 - 2008

| No | Keterangan | Kabupaten Klaten | | | | 2008 | | |
|----|------------|------------------|------|------|------|--------|-----------|-----------|
| | | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | Klaten | Sukoharjo | Surakarta |
| 1 | SD | 25 | 23 | 24 | 22 | 20 | 21 | 61 |
| 2 | SMP | 30 | 31 | 29 | 30 | 29 | 35 | 34 |
| 3 | SMA | 42 | 34 | 33 | 34 | 33 | 34 | 35 |

Ket: Angka dirata-ratakan antara sekolah negeri dan swasta

Sumber: Berbagai sumber (Diolah)

Tabel 3.7 Rasio Murid Terhadap Guru di Kabupaten Klaten Tahun 2004 - 2008

| No | Keterangan | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
|----|------------|------|------|------|------|------|
| 1 | TK Negeri | 13 | 11 | 10 | 9 | 9 |
| 2 | TK Swasta | 12 | 13 | 11 | 11 | 10 |
| 3 | SD Negeri | 14 | 13 | 12 | 12 | 12 |
| 4 | SD Swasta | 22 | 17 | 17 | 15 | 13 |
| 5 | SMP Negeri | 14 | 14 | 14 | 13 | 13 |
| 6 | SMP Swasta | 12 | 11 | 11 | 10 | 10 |
| 7 | SMA Negeri | 13 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| 8 | SMA Swasta | 12 | 9 | 9 | 8 | 7 |
| 9 | SMK Negeri | 12 | 12 | 12 | 12 | 13 |
| 10 | SMK Swasta | NA | NA | 13 | 13 | 14 |

Sumber: Klaten Dalam Angka Tahun 2008

Berdasarkan tabel 3.5 dapat diketahui bahwa sarana pendidikan di Kabupaten Klaten telah tersebar di seluruh kecamatan dengan cukup merata, sedangkan berdasarkan tabel 3.6 dan 3.7, dapat terlihat bahwa rasio antara jumlah murid dengan jumlah kelas, dan rasio murid terhadap guru tidak terlalu tinggi. Keadaan ini menunjukkan bahwa kondisi infrastruktur pendidikan di Kabupaten Klaten relatif cukup baik apabila dibandingkan dengan wilayah-wilayah lain di sekitar Kabupaten Klaten, dimana jumlah murid dalam satu kelas rata-rata hampir sama untuk tiap tingkat pendidikan di masing-masing kabupaten/kota, demikian juga dengan jumlah guru di Kabupaten Klaten, bisa dikatakan mencukupi.

Selain memiliki infrastruktur pendidikan dari tingkat pendidikan dasar sampai dengan pendidikan menengah, Kabupaten Klaten juga memiliki sarana pendidikan tinggi sebanyak 7 perguruan tinggi, baik berupa akademi maupun berupa universitas. Sasaran bidang pendidikan yang ingin dicapai oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Klaten adalah perluasan dan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan yang bermutu, peningkatan kemampuan akademis dan profesionalisme serta perbaikan tingkat kesejahteraan tenaga kependidikan, peningkatan peran serta masyarakat dalam rangka pelaksanaan manajemen berbasis sekolah, peningkatan sarana dan prasarana bidang pendidikan, pengembangan dan pelestarian nilai-nilai budaya dan cagar budaya, serta pengembangan dan pembinaan atlet berbakat, pengembangan budaya prestasi.

3.5.2. Sarana Kesehatan

Kualitas sumber daya manusia sangat dipengaruhi oleh pendidikan dan kesehatan. Luasnya akses masyarakat terhadap fasilitas pendidikan dan kesehatan dapat menunjukkan keberhasilan pemerintah dalam pembangunan dan sekaligus keberhasilan dalam pengentasan kemiskinan.

Sasaran bidang kesehatan yang ingin dicapai oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Klaten adalah peningkatan sikap dan perilaku masyarakat untuk hidup sehat, kemitraan antar pemerintah dan swasta dalam pembangunan dan pelayanan

kesehatan, peningkatan kesehatan lingkungan dan pemukiman, peningkatan penanganan penyakit menular, perbaikan manajemen pelayanan kesehatan, peningkatan sarana dan prasarana pendukung pelayanan kesehatan melalui sarana medis dan pengobatan, serta penyediaan obat-obatan yang terjangkau masyarakat, perlindungan sosial, dan penanggulangan kemiskinan

Kabupaten Klaten sendiri telah memiliki beberapa sarana kesehatan, seperti rumah sakit umum, rumah sakit jiwa, balai pengobatan paru-paru dan puskesmas. Sarana kesehatan ini telah didukung dengan banyaknya tenaga teknis di bidang kesehatan, yang tersebar diseluruh sarana kesehatan yang ada.

Tabel 3.9 Sarana Kesehatan di Kabupaten Klaten Tahun 2008

| No | Sarana Kesehatan | Negeri | Swasta | Jumlah |
|----|----------------------------|------------|------------|------------|
| 1 | Rumah Sakit Umum | 1 | 6 | 7 |
| 2 | Rumah Sakit Jiwa | 1 | 0 | 1 |
| 3 | Rumah Bersalin | 0 | 19 | 19 |
| 4 | Puskesmas | 134 | 0 | 134 |
| 5 | Balai Pengobatan Paru-paru | 1 | 0 | 1 |
| 6 | Balai Pengobatan | 0 | 28 | 28 |
| 7 | Apotek | 1 | 16 | 17 |
| 8 | Toko Obat Berijin | 3 | 0 | 3 |
| 9 | Dokter Praktek | 0 | 222 | 222 |
| | Jumlah | 141 | 291 | 432 |

Sumber: Klaten Dalam Angka Tahun 2008

Berdasarkan data persebaran sarana kesehatan tersebut, tidak seluruh sarana tersebar secara merata di wilayah Kabupaten Klaten. Seperti misalnya apotik, dari 26 kecamatan di Kabupaten Klaten, hanya 13 kecamatan yang memiliki apotik di wilayahnya. Sehingga masyarakat pada beberapa kecamatan harus menempuh perjalanan yang lebih jauh untuk membeli kebutuhan obat-obatan. Selain sarana kesehatan yang disebutkan diatas, di Kabupaten Klaten juga terdapat 2.166 unit Pos

Pelayanan terpadu (Posyandu) yang tersebar secara merata di seluruh wilayah Kabupaten Klaten.

3.5.3. Prasarana Jalan dan Jembatan

Infrastruktur jalan memegang peranan yang sangat penting untuk menunjang kelancaran aktivitas ekonomi, karena infrastruktur jalan menunjang mobilitas perekonomian. Oleh karena itu kondisi dan kualitas jalan, apalagi jalan pada jalur-jalur perekonomian harus tetap pada kondisi dan kualitas yang baik.

Prasarana jalan kabupaten di Kabupaten Klaten sampai dengan semester I 2008 sepanjang 777 km. Sedangkan jalan nasional dan jalan provinsi yang berada di wilayah Kabupaten Klaten masing-masing sepanjang 36,43 km dan 46 km.

Jumlah jembatan yang ada di Kabupaten Klaten tahun 2008 sebanyak 264 buah, yang secara total sepanjang 2.501 km.

Tabel 3.10 Prasarana Jalan Berdasarkan Kondisi Tahun 2004 – 2008

(Dalam %)

| No | Kondisi Jalan | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
|----|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 1 | Baik | 28,82 | 14,10 | 27,69 | 39,36 | 39,36 |
| 2 | Sedang | 27,58 | 25,19 | 22,50 | 19,59 | 19,59 |
| 3 | Rusak | 22,14 | 41,10 | 32,03 | 25,41 | 25,41 |
| 4 | Rusak Berat | 21,45 | 19,61 | 17,78 | 15,65 | 15,65 |
| | Jumlah | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |

Sumber: Klaten Dalam Angka Tahun 2004 - 2008

Dari tabel 3.10 dapat diketahui bahwa lebih dari 41% kondisi jalan di Kabupaten Klaten dalam kondisi rusak, baik rusak sedang maupun rusak berat. Perbaikan-perbaikan atas kondisi jalan di lingkungan Kabupaten Klaten masih menemui kendala biaya, dimana banyak wilayah dengan kondisi jalan yang rusak, namun anggaran perbaikan kualitas jalan ini juga terbatas (Berita Daerah kabupaten Klaten No. 16 Tahun 2009). Kondisi jalan yang rusak ini tentu saja sangat mempengaruhi aktivitas ekonomi di Kabupaten Klaten, karena sarana jalan dan

transportasi memegang peranan penting dalam pengembangan wilayah. Namun demikian, setidaknya seluruh wilayah di Kabupaten Klaten telah terhubung dengan fasilitas jalan kabupaten, meskipun dengan kualitas yang belum cukup baik.

3.5.4. Prasarana Irigasi/Pengairan

Mengingat air merupakan salah satu kebutuhan pokok manusia, maka prasarana air bersih yang baik merupakan bagian penting dari kehidupan masyarakat. Kabupaten Klaten memiliki sumber air yang melimpah dan saat ini telah dimanfaatkan sebagai sumber pengairan/irigasi dan memenuhi kebutuhan air bersih masyarakat. Untuk itu, diperlukan prasarana pengairan yang memadai.

Gempa tektonik pada tahun 2006 telah mengakibatkan kerusakan sarana irigasi (bendungan dan saluran) di sekitar 56 lokasi, dan sampai dengan tahun 2007 Pemerintah Daerah baru mampu melakukan normalisasi sungai di 15 lokasi, rehabilitasi bendungan sebanyak 15 buah, normalisasi sarana irigasi di 15 lokasi, dan melakukan rehabilitasi kantor irigasi sebanyak 5 lokasi (Berita Daerah kabupaten Klaten No. 16 Tahun 2009).

Tabel 3.11 Prasarana Pengairan/Irigasi Kabupaten Klaten Tahun 2006 - 2008

| No | Prasarana Irigasi | Satuan | 2006 | 2007 | 2008 |
|----|-------------------------|--------|---------|---------|---------|
| 1 | Sumber Air | Buah | 134 | 134 | 134 |
| 2 | Waduk | Unit | 1 | 1 | 1 |
| 3 | Sarana Pengairan teknis | | | | |
| | a. Saluran Primer | km | 144.586 | 144.586 | 144.586 |
| | b. Saluran Sekunder | km | 635.993 | 635.993 | 635.993 |
| | c. Saluran Tersier | km | 734.471 | 734.471 | 734.471 |

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Klaten dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Klaten Tahun Anggaran 2008

Namun, berdasarkan tabel 3.11 dapat diketahui bahwa selama kurun waktu 3 tahun, Pemerintah Daerah Kabupaten Klaten tidak menambah jumlah sarana

pengairan teknis. Padahal, sarana air bersih sangat penting dalam kehidupan masyarakat sekaligus sebagai faktor penting dalam pengembangan wilayah. Seperti diketahui bahwa setidaknya terdapat 134 sumber air di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Klaten, namun sumber air tersebut tersebar secara tidak merata di seluruh wilayah. Berdasarkan data dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Klaten, pada tahun 2008 terdapat kurang lebih 10 kecamatan yang rawan kekurangan air bersih, dan 4 kecamatan secara permanen kekurangan air bersih.

3.5.5. Kejadian Luar Biasa

Salah satu kejadian luar biasa yang terjadi dan mempengaruhi perekonomian Kabupaten Klaten, adalah gempa bumi yang terjadi pada tanggal 27 Mei 2006. Gempa berkekuatan 5,9 SR ini berpusat di 25 km selatan-barat daya Yogyakarta pada koordinat $8,26^{\circ}\text{LS}$ dan $110,31^{\circ}\text{BT}$ pada kedalaman 33 km. Walaupun pusat gempa berada di Yogyakarta, namun kerusakan parah juga terjadi di wilayah Kabupaten Klaten. Berdasarkan data dari www.klaten.go.id tercatat terdapat banyak infrastruktur yang mengalami kerusakan.

Tabel 3.12 Data Kerusakan Infrastruktur Akibat Gempa 27 Mei 2006

| No | Item Kategori | Satuan | Jumlah | No | Item Kategori | Satuan | Jumlah |
|----------|-------------------------------|--------|--------|----------|----------------------------|--------|--------|
| 1 | Korban jiwa | | | 7 | Prasarana Irigasi | | |
| | Meninggal | jiwa | 1.046 | | Rusak berat | m2 | 3.351 |
| | Luka-luka | jiwa | 18.127 | | Rusak Sedang | m2 | 0 |
| 2 | Rumah Penduduk | | | | Rusak ringan | m2 | 0 |
| | Roboh | unit | 30.605 | 8 | Pasar | | |
| | Rusak berat | unit | 62.755 | | Rusak berat | unit | 298 |
| | Rusak ringan | unit | 95.031 | | Rusak Sedang | unit | 6 |
| 3 | Prasarana Pemerintahan | | | | Rusak ringan | unit | 4 |
| | Roboh/rusak berat | unit | 19 | 9 | Prasarana Kesehatan | | |
| | Rusak Sedang | unit | 89 | | Rusak berat | unit | 10 |
| | Rusak ringan | unit | 54 | | Rusak Sedang | unit | 32 |

(Sambungan)

| No | Item Kategori | Satuan | Jumlah |
|----|-----------------------------|--------|--------|
| 4 | Prasarana Pendidikan | | |
| | Roboh/rusak berat | unit | 53 |
| | Rusak Sedang | unit | 324 |
| | Rusak ringan | unit | 63 |
| 5 | Prasarana Jalan | | |
| | Rusak berat | km | 0 |
| | Rusak Sedang | km | 16 |
| | Rusak ringan | km | 0 |
| 6 | Prasarana Jembatan | | |
| | Rusak berat | buah | 0 |
| | Rusak Sedang | buah | 19 |
| | Rusak ringan | buah | 0 |

| No | Item Kategori | Satuan | Jumlah |
|----|----------------------|--------|--------|
| | Rusak ringan | unit | 25 |
| 10 | Tempat Ibadah | | |
| | Rusak berat | unit | 37 |
| | Rusak Sedang | unit | 255 |
| | Rusak ringan | unit | 182 |
| 11 | Candi | | |
| | Rusak berat | unit | 0 |
| | Rusak Sedang | unit | 1 |
| | Rusak ringan | unit | 0 |

Sumber: www.klaten.go.id

Atas musibah tersebut, pemerintah daerah Kabupaten Klaten telah merealisasikan Belanja Tidak Tersangka Tahun Anggaran 2006 sebesar kurang lebih 18 milyar rupiah, yang digunakan untuk melakukan perbaikan atau rehabilitasi beberapa fasilitas umum yang rusak akibat gempa.

3.6. Kondisi Makro Ekonomi Kabupaten Klaten

3.6.1. Produk Domestik Regional Bruto

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) adalah seluruh nilai tambah yang ditimbulkan oleh berbagai faktor produksi/lapangan usaha yang melakukan kegiatan usahanya di suatu wilayah, tanpa memperhatikan kepemilikan atas faktor produksi. Dengan demikian, secara agregat menunjukkan kemampuan suatu wilayah dalam menghasilkan pendapatan/balas jasa kepada faktor-faktor produksi yang ikut berpartisipasi dalam produksi di wilayah tersebut, sehingga PDRB menjadi tolok ukur yang paling umum dipakai untuk mengukur keberhasilan perekonomian suatu wilayah.

Tabel 3.13 PDRB dan PDRB per Kapita dengan Harga Konstan Kabupaten Klaten Tahun 2004 – 2008

| PDRB | Satuan | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
|--------------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| PDRB Harga Konstan | Juta Rupiah | 3.975.792,87 | 4.158.205,16 | 4.253.788,00 | 4.394.688,02 | 4.567.200,96 |
| PDRB per Kapita | Rupiah | 3.107.333,54 | 3.238.691,91 | 3.290.470,00 | 3.392.004,66 | 3.516.704,93 |

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah dan Klaten Dalam Angka 2008 (diolah).

Tabel 3.14 Prosentase Pertumbuhan PDRB dan PDRB per Kapita Tahun 2004 – 2008

| No | PDRB | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
|-----------|---------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 1 | PDRB dengan Harga Konstan | 4,86 | 4,59 | 2,30 | 3,31 | 3,93 |
| 2 | PDRB per Kapita | 4,47 | 4,23 | 1,60 | 3,09 | 3,68 |

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah dan Klaten Dalam Angka 2008 (diolah).

Laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Klaten dalam kurun waktu 5 tahun mengalami penurunan, terutama pada tahun 2006, ketika terjadi gempa tektonik pada tanggal 27 Mei 2006. Selanjutnya pada tahun 2007 dan 2008, laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Klaten mulai mengalami peningkatan sehingga mencapai angka pertumbuhan sebesar 3,31% dan 3,93%. Peningkatan ini antara lain terjadi karena kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi perekonomian masyarakat pasca bencana gempa bumi, yang dianggarkan oleh pemerintah pusat, pemerintah provinsi Jawa Tengah, maupun pemerintah Kabupaten Klaten, serta berbagai lembaga donor baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri, sehingga mampu menggerakkan kembali perekonomian masyarakat.

Dengan kondisi Kabupaten Klaten dengan jumlah PDRB dan PDRB per kapita seperti yang tergambar dalam tabel diatas, secara umum, Kabupaten Klaten tergolong daerah dengan PDRB per kapita yang cukup rendah. Hal ini dapat dibuktikan dengan fakta bahwa daerah-daerah lain di sekitar Kabupaten Klaten memiliki nilai PDRB Per

kapita yang lebih tinggi. Dari tabel 3.15 dapat dilihat bahwa Kabupaten Klaten memiliki nilai PDRB per Kapita yang paling rendah di antara daerah-daerah yang terdekat dengan Kabupaten Klaten.

Tabel 3.15 Perbandingan PDRB Per Kapita tahun 2004 – 2008

(dalam rupiah)

| No | Entitas | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
|----|--------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|
| 1 | Prov Jawa Tengah | 4.284.047,89 | 4.484.910,42 | 4.689.985,08 | 4.913.801,20 | 5.140.000,00* |
| 2 | Kab. Sukoharjo | 4.645.152,54 | 4.698.135,14 | 4.986.678,18 | 5.222.570,00 | 5.440.420,00 |
| 3 | Kabupaten Klaten | 3.107.333,54 | 3.238.691,91 | 3.290.470,00 | 3.392.004,66 | 3.516.704,93 |
| 4 | Kabupaten Boyolali | 3.542.803,26 | 3.675.934,47 | 3.822.175,15 | 3.963.578,22 | 4.113.171,39 |
| 5 | Kota Surakarta | 7.184.833,40 | 7.217.737,96 | 7.930.485,11 | 8.351.806,79 | 8.699.633,71 |

*Angka perkiraan dari BPS

Sumber: berbagai sumber

3.6.2. Struktur Ekonomi

Kemampuan suatu daerah atas suatu sektor dapat dilihat dari keunggulan komparatif yang dimiliki oleh sektor tertentu tersebut dalam suatu wilayah. Artinya sektor tersebut bisa memproduksi lebih daripada yang dibutuhkan oleh daerahnya, sehingga memiliki potensi untuk menjadi daerah pengekspor. Dengan menggunakan metode *Location Quotient*, maka kemampuan Kabupaten Klaten dapat diketahui pada tabel 3.16.

Location Quotient memberikan indikasi sebagai berikut:

$LQ > 1$, memiliki arti bahwa suatu sektor tertentu memiliki keunggulan komparatif, atau cukup efisien dalam berproduksi, dan daerah tersebut memiliki potensi untuk mengekspor produk dalam sektor yang sedang diteliti;

$LQ=1$, memiliki arti bahwa daerah yang diteliti hanya mampu memenuhi sendiri kebutuhan akan produk dalam sektor yang sedang diteliti;

$LQ < 1$, memiliki arti bahwa suatu sektor tertentu tidak memiliki keunggulan komparatif, atau kurang efisien dalam berproduksi, dan daerah yang diteliti memiliki potensi untuk mengimpor produk dalam sektor yang sedang diteliti.

Tabel 3.16 Struktur Perekonomian Kabupaten Klaten
Berdasarkan PDRB atas Dasar Harga Konstan Tahun 2000

(Dalam juta)

| | Sektor | Tahun 2006 | | LQ | Tahun 2007 | | LQ |
|---|--|---------------------|---------------|------|---------------------|---------------|------|
| | | Nilai | % | | Nilai | % | |
| 1 | Pertanian | 943.060,85 | 22,17 | 1,08 | 957.297,31 | 21,78 | 1,09 |
| 2 | Pertambangan/Penggalian | 53.338,31 | 1,25 | 1,13 | 55.826,27 | 1,27 | 1,13 |
| 3 | Industri Pengolahan | 841.653,96 | 19,79 | 0,62 | 869.903,33 | 19,79 | 0,62 |
| 4 | Listrik dan Air Minum | 27.849,31 | 0,65 | 0,79 | 30.423,64 | 0,69 | 0,82 |
| 5 | Bangunan/Konstruksi | 365.824,54 | 8,60 | 1,53 | 398.079,88 | 9,06 | 1,59 |
| 6 | Perdagangan, Hotel, dan Restoran | 1.191.778,73 | 28,02 | 1,33 | 1.230.415,46 | 28,00 | 1,31 |
| 7 | Angkutan dan Komunikasi | 113.985,64 | 2,68 | 0,54 | 119.386,12 | 2,72 | 0,54 |
| 8 | Keuangan, Persewaan, dan Jasa perusahaan | 148.969,69 | 3,50 | 0,98 | 156.907,22 | 3,57 | 0,99 |
| 9 | Jasa-jasa | 567.326,97 | 13,34 | 1,30 | 576.448,79 | 13,12 | 1,27 |
| | PDRB | 4.253.788,00 | 100,00 | | 4.394.688,02 | 100,00 | |

Sumber: Jawa Tengah Dalam Angka dan Klaten Dalam Angka tahun 2007 dan 2008 (diolah)

Berdasarkan perhitungan, diketahui bahwa sektor yang memiliki nilai LQ tertinggi adalah sektor bangunan dan konstruksi, dengan nilai sebesar 1,53 pada tahun 2006, dan 1,59 pada tahun 2007. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun *share* sektor ini terhadap PDRB hanya sekitar 8%, namun ternyata sektor ini merupakan sektor unggulan Kabupaten Klaten. Pada bulan Mei 2006, Kabupaten Klaten mengalami bencana alam gempa bumi yang mengakibatkan kerusakan parah pada kondisi infrastruktur di lingkungan Kabupaten Klaten. Setelah bulan Mei, pemerintah Kabupaten Klaten dibantu dengan pihak-pihak lain mulai membangun kembali infrastruktur dasar dalam rangka restrukturisasi kondisi fisik Kabupaten Klaten. Pembangunan infrastruktur pasca gempa bumi tersebut menyebabkan LQ sektor bangunan dan konstruksi Kabupaten Klaten selama 2 tahun memiliki LQ yang cukup tinggi.

Sedangkan sektor lain yang juga dapat dijadikan sektor unggulan adalah sektor perdagangan, hotel, dan restoran dengan LQ sebesar 1,33 pada tahun 2006, dan

sebesar 1,31 pada tahun 2007. Selain memiliki LQ yang nilainya cukup tinggi, sektor perdagangan, hotel, dan restoran juga merupakan sektor yang paling mendominasi struktur perekonomian di Kabupaten Klaten. Dari ketiga elemen tersebut (perdagangan, hotel, dan restoran), nampaknya sektor perdagangan dan restoran yang memberikan sumbangan lebih besar daripada sektor perhotelan. Hal ini dibuktikan dengan terus meningkatnya ijin usaha perdagangan yang dikeluarkan oleh pihak pemerintah daerah Kabupaten Klaten. Sementara jumlah penjualan kamar hotel di lingkungan Kabupaten Klaten memiliki kecenderungan menurun.

Sektor pertambangan/penggalian dinilai cukup efisien dalam berproduksi, dengan nilai LQ sebesar 1,13. Hal ini menunjukkan bahwa sektor ini juga memiliki potensi yang sangat baik untuk dikembangkan, sehingga mampu menyumbang lebih banyak bagi PDRB Kabupaten Klaten. Saat ini, sektor pertambangan hanya menyumbang rata-rata sebesar 1,26% terhadap PDRB Kabupaten Klaten, sementara menurut pihak DPPKAD, sektor pertambangan/penggalian ini memiliki potensi besar yang belum dikelola secara optimal oleh pihak-pihak terkait. Namun demikian, berdasarkan nilai LQ-nya, sektor pertambangan/penggalian dinilai cukup efisien, artinya dengan kondisi yang ada sekarang Kabupaten Klaten mampu memenuhi kebutuhannya dari sektor pertambangan, bahkan mampu memenuhi kebutuhan daerah lain.

Sementara sektor pertanian yang oleh beberapa pihak luar (diantaranya pihak Bank Indonesia Surakarta dan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah) diakui sebagai sektor unggulan di Kabupaten Klaten, memiliki nilai LQ pada tahun 2006 dan 2007 sebesar 1,08 dan 1,09, sehingga bisa disimpulkan bahwa sektor pertanian di Kabupaten Klaten memiliki potensi yang cukup baik, dan sektor ini menyumbang rata-rata sebesar 21% terhadap total PDRB Kabupaten Klaten. Berdasarkan tata guna lahannya, 51,41% tanah di lingkungan Kabupaten Klaten digunakan sebagai lahan persawahan dengan kondisi tanah yang cukup subur. Selama bertahun-tahun, Kabupaten Klaten merupakan penyangga pangan di lingkungan Provinsi Jawa Tengah dengan produk unggulannya berupa beras Delanggu (www.jatengprov.go.id). Dua kondisi ini merupakan alasan mengapa pihak Provinsi Jawa Tengah

memprediksikan bahwa Kabupaten Klaten sangat potensial untuk dijadikan kawasan agropolitan, yaitu kawasan yang berbasis pertanian yang berkelanjutan.

Namun, meskipun memiliki potensi yang baik, ternyata *share* sektor pertanian terhadap total PDRB Kabupaten Klaten memiliki kecenderungan menurun. Bupati Klaten dalam Harian Solo Pos tanggal 27 Juli 2007 menyatakan pada tahun 2007, diakui bahwa produksi sektor pertanian mengalami penurunan. Hal ini disebabkan semakin banyaknya jenis hama yang menyerang tanaman padi. Selain itu, gempa tektonik yang terjadi pada tahun 2006 menyebabkan kerusakan pada sistem irigasi di Kabupaten Klaten, yang secara tidak langsung mempengaruhi produksi padi. Masalah lain yang menyebabkan turunnya hasil produksi sektor pertanian, masih menurut Bupati Klaten, adalah rusaknya ekosistem lahan pertanian karena pengolahan lahan yang tidak memperhatikan lingkungan.

Faktor lain yang menyebabkan menurunnya *share* sektor pertanian dalam PDRB adalah karena berkurangnya lahan pertanian/persawahan. Selama beberapa tahun terakhir, diketahui bahwa banyak terjadi pengalihan fungsi lahan pertanian menjadi perumahan/pemukiman, untuk lahan industri, dan lahan perdagangan. Pada tahun 2006, lahan pertanian berkurang seluas 27 ha, pada tahun 2007 berkurang lagi seluas 32 ha, dan pada tahun 2008 berkurang lagi seluas 12 ha (Berita Daerah Kabupaten Klaten). Mengingat potensi pertanian yang cukup baik, sektor pertanian dapat terus dijadikan sektor unggulan di Kabupaten Klaten.

Sektor industri pengolahan mendapatkan nilai LQ sebesar 0,62, dan sehingga dikategorikan sebagai sektor yang tidak memiliki keunggulan komparatif dan berpotensi mengimpor dari daerah lain. Meskipun berdasarkan perhitungan LQ sektor industri pengolahan bukan merupakan sektor yang efisien, namun sebenarnya Kabupaten Klaten memiliki modal dasar yang cukup baik dalam rangka pengembangan sektor ini. Beberapa produk unggulan yang direkapitulasi oleh Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UMKM antara lain adalah industri pengecoran logam, industri pande besi, industri mebel, industri tembakau, industri konveksi, dan industri keramik/genteng (www.jatengprov.go.id). Dan, industri pengolahan menyumbang rata-rata sebesar 19% terhadap PDRB Kabupaten Klaten.

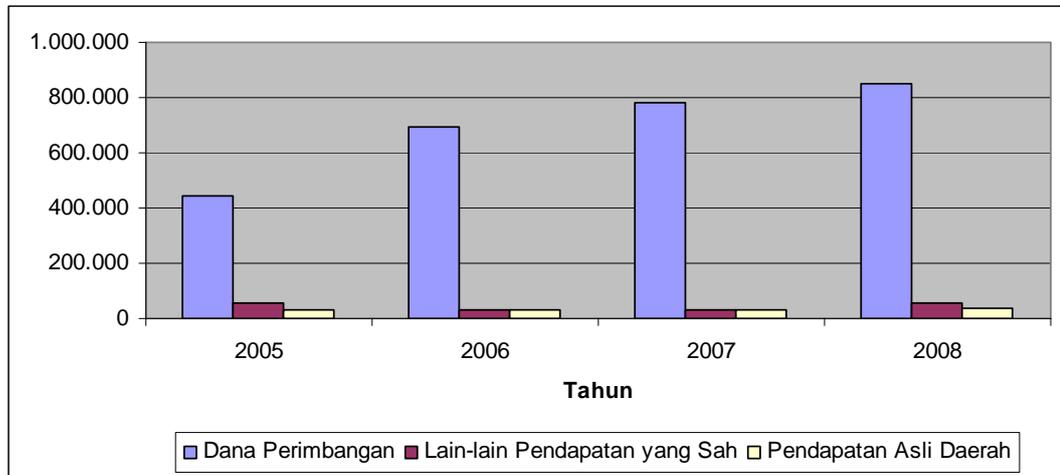
Industri kecil lain yang saat ini mulai berkembang kembali di Kabupaten Klaten adalah kerajinan kain Lurik, kain khas Klaten. Kain lurik, pada masanya dahulu pernah menjadi industri yang berkembang pesat, namun lambat laun mengalami kemerosotan karena kurangnya perhatian pemerintah terhadap pengrajin kain lurik. Sejak tahun 2009, Pemerintah Daerah Kabupaten Klaten, melalui instruksi Bupati, telah menggalakkan kembali kerajinan kain lurik dan menginstruksikan seluruh jajarannya untuk memakai baju dari kain lurik setiap hari Kamis dan Jumat. Dengan adanya instruksi ini, tentu saja membangkitkan kembali kerajinan kain lurik yang telah lama mati suri, ditambah lagi kabupaten-kabupaten sekitar juga banyak memesan kain lurik untuk dijadikan seragam PNS di lingkungan mereka.

3.6.3. Pendapatan Daerah

Komponen pendapatan daerah dapat dibagi menjadi 3 kelompok besar, yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan, dan Lain-lain Pendapatan yang Sah. Secara umum pendapatan daerah Kabupaten Klaten mengalami peningkatan. Pada tahun 2005 total pendapatan daerah sebesar Rp529.739.191.842,00, dan mengalami peningkatan pada tahun 2006 menjadi Rp760.141.004.532,00, tahun 2007 menjadi sebesar Rp845.758.146.077,00, dan tahun 2008 menjadi sebesar Rp948.449.016.821,00.

Dari grafik 3.1 dapat terlihat bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Klaten masih sangat tergantung pada dana perimbangan dari pusat. Pendapatan Asli Daerah (PAD) belum dapat dijadikan sumber pembiayaan pembangunan. Pada tahun 2005, PAD hanya menyumbang sekitar 5,49% terhadap total penerimaan, sedangkan pada tahun 2006 sampai dengan 2008, sumbangan PAD terhadap total penerimaan daerah adalah sebesar 4,46%, 3,96%, dan 4,04%. Dampak otonomi daerah pada Kabupaten Klaten masih terlihat stagnan, karena pada kenyataannya pemerintah daerah Kabupaten Klaten belum mampu mencukupi kebutuhan belanja melalui PAD, dan masih sangat tergantung dengan transfer pemerintah pusat.

(Dalam Juta)



Gambar 3.2 Komposisi Pendapatan Daerah Dalam APBD Kabupaten Klaten Tahun 2005 – 2008

Sumber: Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Klaten Tahun Anggaran 2005 – 2008.

3.6.4. Belanja Daerah

Berdasarkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Klaten Tahun Anggaran 2008, belanja daerah Tahun 2008 diarahkan untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Kebijakan tersebut ditempuh dengan cara:

- Meningkatkan proporsi belanja modal dan investasi yang dapat memberi dampak besar dalam peningkatan ekonomi rakyat, serta memiliki efek ganda terhadap kemajuan bidang-bidang kehidupan lainnya;
- Meningkatkan efisiensi dan fektifitas belanja daerah melalui penyusunan Standar Analisis Belanja, Standar Harga, dan Tolok Ukur Kinerja serta intensifikasi pengawasan, baik oleh aparatur pengawas fungsional maupun masyarakat;
- Meningkatkan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah antara lain dengan menyusun laporan akuntabilitas oleh setiap SKPD dan pengendalian kegiatan setiap pimpinan;

- Mengimplementasikan anggaran berbasis kinerja secara terpadu dan sesuai dengan peraturan yang berlaku;
- Menjamin alokasi belanja daerah dengan memberikan skala prioritas belanja yang langsung menyentuh kepentingan dan kebutuhan masyarakat.

Tabel 3.17 Realisasi Belanja Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2007 dan 2008
(Dalam juta)

| No | Keterangan | 2007 | 2008 |
|----|---------------------|-----------------|-------------------|
| 1 | Belanja Operasional | 727.169.222.260 | 854.309.519.194 |
| 2 | Belanja Modal | 138.749.673.852 | 144.478.226.483 |
| 3 | Belanja Tak Terduga | 187.226.000 | 645.400.000 |
| 4 | Belanja Transfer | 603.226.207 | 701.653.358 |
| | Total Belanja | 866.709.348.319 | 1.000.134.799.035 |

Sumber: Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Klaten Tahun Anggaran 2007 dan 2008

Pada tahun 2007, sekitar 58,74% dari APBD Kabupaten Klaten digunakan belanja pegawai dan hanya 41,26% APBD yang dialokasikan sebagai anggaran publik. Salah satu faktor yang menyebabkan dominannya belanja pegawai adalah karena jumlah PNS di lingkungan Kabupaten Klaten yang sangat banyak, yang tentu saja membebani dan menyedot Dana Alokasi Umum (DAU). Dana anggaran publik yang hanya sekitar 40% ini tentu saja masih sangat perlu ditambah karena masih banyak wilayah yang masih harus dibangun, karena pengembangan wilayah untuk kepentingan publik tidak semuanya bisa diakomodir karena keterbatasan dana. Bahkan menurut beberapa pihak, selama 4 tahun terakhir pembangunan di pusat kota dianggap cenderung stagnan, dan tidak ada pembangunan yang berarti. Tetapi pada kenyataannya, pada tahun 2008 jumlah belanja pegawai justru naik menjadi 63,97%, sehingga porsi untuk kepentingan publik semakin berkurang.

3.6.5. Penanaman Modal

Ketergantungan Pemerintah Daerah Kabupaten Klaten akan dana perimbangan dari pemerintah pusat sangat besar, dan menyebabkan kemandirian Pemerintah Daerah Kabupaten Klaten sangat lemah. Hal ini terjadi karena Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Klaten belum mampu menjadi penopang pembiayaan pembangunan. Untuk itulah sangat diperlukan penggalan potensi pajak dan retribusi daerah, dan meningkatkan iklim investasi yang kondusif, dalam rangka menarik minat investor untuk menanamkan modal di Kabupaten Klaten.

Namun pada kenyataannya, belum banyak investor yang mau berinvestasi di lingkungan Kabupaten Klaten. Permasalahan ini salah satunya disebabkan oleh rumitnya proses birokrasi. Sistem birokrasi di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Klaten dinilai rumit dan berbelit-belit, sehingga para investor harus berpikir dua kali sebelum bersedia menanamkan investasi ke Kabupaten Klaten. Untuk mengatasi masalah tersebut, pemerintah Daerah Kabupaten Klaten harus berani melakukan reformasi birokrasi, dan memotong jalur birokrasi sehingga para investor tidak merasa dipersulit dalam mengurus segala keperluan investasinya.

Tabel 3.18 Penanaman Modal di Kabupaten Klaten Tahun 2008

| No | Bidang Usaha | Jumlah Usaha | Nilai Investasi (milyar) | Total Tenaga Kerja | Status |
|----|---------------------------|--------------|--------------------------|--------------------|----------|
| 1 | Perikanan | 1 | 31.334 | 79 | PMA |
| 2 | Mesin dan Logam | 1 | 9.519 | 62 | PMA |
| 3 | Air Minum Dalam Kemasan | 2 | 15.150 | 1.500 | PMDN |
| 4 | Furniture | 11 | 132.830 | 891 | PMA/PMDN |
| 5 | Sarung Tangan Olahraga | 4 | 9.940 | 1.148 | PMA |
| 6 | Pertanian/agro | 3 | 107.480 | 131 | PMA |
| 7 | Textile | 1 | 7.500 | 911 | PMDN |
| 8 | Bubur Bayi dan Susu | 1 | 250.636 | 794 | PMA |
| 9 | Jasa Rekreasi/entertainer | 2 | 124.650 | 1.647 | PMA/PMDN |
| 10 | Jasa perdagangan | 5 | 55.938 | 674 | PMA/PMDN |
| 11 | Perdagangan Logistik | 1 | 3.150 | 100 | PMA |
| 12 | Pendidikan/Ketrampilan | 1 | 1.500 | 25 | PMA |

(Sambungan)

| No | Bidang Usaha | Jumlah Usaha | Nilai Investasi (milyar) | Total Tenaga Kerja | Status |
|----|------------------|--------------|--------------------------|--------------------|--------|
| 13 | Penyamakan Kulit | 1 | 2.250 | 200 | PMA |
| 14 | Industri Rokok | 1 | 4.150 | 100 | PMDN |

Sumber: Klaten Dalam Angka 2008

3.7. Potensi Kabupaten Klaten

3.7.1. Potensi Sumber Daya Alam

Karena kondisi wilayah Kabupaten Klaten yang bervariasi, banyak potensi sumber daya alam yang sangat menguntungkan bagi Kabupaten Klaten, diantaranya:

a. Potensi Pajak Galian Gol. C

Sebagai daerah yang sebagian besar daerahnya merupakan dataran rendah dan pegunungan kapur dan wilayah utaranya merupakan wilayah pegunungan, Kabupaten Klaten memiliki banyak keuntungan dan potensi. Potensi wisata pegunungan, potensi penambangan pasir di daerah barat laut, dan potensi penambangan kapur di wilayah tengah.

Dengan potensi sebesar itu, namun berdasarkan fakta pada tabel 3.17 tampaknya Pemerintah Daerah Kabupaten Klaten belum dapat memaksimalkan potensi yang ada. Penerimaan pajak daerah Kabupaten Klaten masih belum optimal, hal ini berdasarkan pada hasil survey yang dilakukan oleh Bidang Pendapatan Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) pada bulan Mei 2008, yang menyimpulkan bahwa Kabupaten Klaten memiliki potensi penerimaan pajak dari bahan galian golongan C yang sangat luar biasa.

Tabel 3.19 Potensi Pajak Galian C Kabupaten Klaten Tahun 2008

(dalam ribu)

| No | Pos Pemungutan | Potensi Pajak per Triwulan (Rp) | | | | |
|----|---------------------------|---------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | I | II | III | IV | Jumlah |
| 1 | Mipitan | 382.680 | 765.360 | 1.148.040 | 1.148.040 | 3.444.120 |
| 2 | Depan Koramil Manisrenggo | 104.760 | 209.520 | 314.280 | 314.280 | 942.840 |
| 3 | Tambakan/Joton | 60.480 | 120.96 | 181.440 | 181.440 | 544.320 |
| 4 | Leses Manisrenggo | 25.200 | 50.400 | 75.600 | 75.600 | 226.800 |
| 5 | Ngemplak Karangnongko | 66.240 | 132.480 | 198.720 | 198.720 | 596.160 |
| 6 | Surowono Kemalang | 116.640 | 233.280 | 349.920 | 349.920 | 1.049.760 |
| | total | 756.000 | 1.512.000 | 2.268.000 | 2.268.000 | 6.804.000 |

Sumber: Catatan atas Laporan Keuangan Kabupaten Klaten Tahun Anggaran 2008.

Namun, pada kenyataannya jumlah penerimaan pajak bahan galian golongan C selama tahun 2005 sampai tahun 2008 tidak bisa mencapai hasil seperti yang dihasilkan dalam survey tersebut diatas. Pemerintah Daerah Kabupaten Klaten menyatakan bahwa belum optimalnya penerimaan pajak bahan galian Golongan C tersebut dikarenakan adanya keberatan dari para penambang apabila tarif pajak disesuaikan. Selain itu, belum tercapainya target pendapatan di Kabupaten Klaten dikarenakan masih terbatasnya sarana dan prasarana sebagai penunjang penarikan pajak dan retribusi.

b. Sumber Air Tanah

Aset berharga lain yang dimiliki oleh pemerintah daerah Kabupaten Klaten adalah sumber mata air Cokro di Desa Ponggok kecamatan Polanharjo, dan sumber mata air Cokro Tulung di Kecamatan Tulung. Kedua sumber mata air ini, saat ini dikerjasamakan dengan dua pihak, yaitu PT. Tirta Investama (produsen air minum kemasan) untuk sumber mata air Cokro di Desa Ponggok kecamatan Polanharjo dengan surat kesepakatan bersama tanggal 20 Maret 2002 dan diperbaharui dengan surat kesepakatan bersama tanggal 12 Mei 2005. Sedangkan sumber mata air Cokro

Tulung di Kecamatan Tulung dimanfaatkan oleh PDAM Kota Surakarta sesuai dengan Keputusan Bupati Klaten Nomor 503/1021/2000 tanggal 24 November 2000 tentang Penggunaan/Pengambilan Air Bersih di Sumber Mata Air Cokro Tulung.

Kerjasama ini menunjukkan adanya pengelolaan aset yang baik. Dengan potensi yang dimiliki, pemerintah daerah telah memperoleh keuntungan dari kerja sama yang dilakukan dengan kedua pihak tersebut diatas. PT. Tirta Investama setiap tahun memberikan sumbangan kepada pemerintah daerah dan pada tahun 2008 PT. Tirta Investama telah menyumbangkan dana sebesar Rp4.422.049.940,00.

3.7.2. Potensi Pariwisata

Berdasarkan data yang dihimpun oleh Badan Pembinaan/Pengembangan Obyek Wisata Kabupaten Klaten Tahun 1986, Kabupaten Klaten memiliki berbagai macam jenis obyek wisata, baik berupa wisata alam maupun wisata budaya. Obyek wisata alam di lingkungan Kabupaten Klaten berupa keindahan alam dan pemandian/sendang, setidaknya terdapat 4 obyek keindahan alam dan 10 obyek wisata pemandian/sendang. Untuk wisata budaya, Kabupaten Klaten memiliki setidaknya 7 candi, 12 tempat ziarah, 5 upacara tradisional, dan 9 kesenian tradisional khas Kabupaten Klaten. Namun, tidak seluruh obyek wisata tersebut bisa dinikmati lagi saat ini, karena beberapa dari obyek wisata tersebut telah rusak, khususnya yang berupa pemandian/sendang.

Dari aset yang ada dan telah dimanfaatkan potensinya, berikut ini adalah beberapa aset lain yang sangat berpotensi untuk meningkatkan penerimaan daerah dalam rangka memberikan pelayanan publik kepada masyarakat.

a. Kompleks Candi Sewu

Candi Sewu adalah kompleks Candi Budha terbesar kedua setelah Candi Borobudur, dan berada tidak jauh dari kompleks Candi Prambanan. Sebagai aset budaya sekaligus aset daerah, ternyata kompleks Candi Sewu ini kurang mendapatkan perhatian, dan menjadi “anak tiri” karena pemerintah daerah Kabupaten Klaten cenderung lebih memperhatikan Candi Prambanan, sehingga kompleks Candi Sewu dan candi-candi yang lain (seperti Candi Plaosan, Candi Lumbung, Candi Bubah,

Candi Asu, Candi Sojiwan dan Candi Merak) kurang mendapat kesempatan untuk dipromosikan sebagai tempat wisata yang dimiliki oleh Pemerintah daerah Kabupaten Klaten. Dengan kesadaran bahwa pemerintah daerah memiliki potensi wisata yang luar biasa, dan dengan dukungan yang cukup kepada Kompleks Candi Sewu ini, maka diharapkan potensi ini akan menjadi kekuatan bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Klaten untuk menggerakkan perekonomian sekitar sekaligus mendongkrak penerimaan daerah.

b. Yaqowiyu

Selain memiliki aset yang nyata, Pemerintah daerah Kabupaten Klaten juga memiliki *intangible asset*, yaitu tradisi Yaqowiyu. Tradisi Yaqowiyu adalah upacara adat yang diadakan di kecamatan Jatinom, yang diadakan setiap bulan Jawa pada bulan Sapar, sehingga oleh penduduk setempat sering disebut tradisi Saparan. Upacara Yaqowiyu ditandai dengan penyebaran kue apem, kue tradisional di kabupaten Klaten, yang disebarkan dari atas menara masjid untuk kemudian diperebutkan oleh masyarakat yang sudah menunggu disekitarnya. Kue apem ini dipercaya memiliki kekuatan supranatural yang membawa kesejahteraan bagi yang berhasil mendapatkannya (www.wikipedia.co.id). Tradisi ini sama uniknya dengan tradisi lompat batu di Nias, atau tradisi syawalan di Keraton Surakarta.

c. Rawa Jombor

Masyarakat Klaten dan sekitarnya tentu sudah tidak asing dengan obyek wisata Rowo Jombor, yang merupakan salah satu obyek wisata andalan yang dimiliki Kabupaten Klaten. Rowo jombor adalah semacam danau yang memiliki fasilitas rumah makan apung di atasnya.

Dalam situs pariwisata milik Departemen Kebudayaan dan Pariwisata provinsi Jawa Tengah disebutkan bahwa rawa Jombor merupakan daerah tujuan wisata alam yang sangat menarik dengan hamparan air rawa yang jernih. Daerah tersebut dikelilingi oleh pegunungan kapur yang sangat indah. Oleh penduduk sekitar, rawa tersebut dimanfaatkan sebagai tempat pemancingan dan budidaya ikan dalam terumbu. Selain itu juga difungsikan sebagai tempat penampungan air untuk irigasi daerah-daerah sekitarnya.

d. Umbul Ingas

Umbul Ingas adalah obyek wisata keluarga terbaru yang dibangun oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Klaten secara *multi years* dari tahun 2007, dan pada tahun 2010, Umbul Ingas direncanakan akan mulai dibuka untuk umum. Umbul Ingas berbentuk *water boom* dengan luas mencapai 495m², dan dilengkapi dengan *water slide* (luncuran air) dengan ketinggian mencapai 8m dan panjang lintasan mencapai 50m.

e. Desa Kerajinan Gerabah Bayat

Kabupaten Klaten merupakan daerah penghasil kerajinan yang cukup besar. Berbagai jenis kerajinan yang dihasilkan seperti lukis payung, lukis kaca, dan gerabah merupakan komoditi yang mampu meningkatkan dan menggerakkan perekonomian di Kabupaten Klaten. Salah satu diantara kerajinan tersebut adalah gerabah, dimana Desa Bayat merupakan salah satu penghasil gerabah yang sangat besar.

Sebenarnya hasil kerajinan gerabah di Bayat tidak kalah unik dengan kerajinan gerabah milik Desa Kasongan di Bantul, Yogyakarta. Jika gerabah Kasongan lebih cenderung bernuansa China seperti guci dan vas bunga berbentuk guci, kerajinan gerabah di Bayat justru lebih indah dengan tema etnis yang lebih rumit. Gerabah dari Bayat ini banyak diekspor keluar negeri untuk memenuhi pesanan para wisatawan yang sebelumnya datang ke Bayat. Namun krisis yang melanda perekonomian Indonesia serta peristiwa bom Bali, sangat mempengaruhi produksi gerabah di Bayat ini. Sekarang ekspor menurun drastis, dan pesanan lebih banyak dari dalam kota, seperti untuk keperluan kafe atau semacamnya, itupun jumlahnya tidak seberapa (<http://komboran.blogspot.com> dan <http://pariwisata.solonet.co.id>).

3.8. Kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2010

3.8.1. Komitmen Pemerintah Daerah Kabupaten Klaten

Komitmen merupakan kesanggupan Pemerintah Daerah Kabupaten Klaten untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu terkait dengan kegiatan pemerintahan, baik karena ketentuan peraturan perundang-undangan (termasuk didalamnya

Peraturan Daerah), maupun karena ikatan perjanjian tertulis (kontrak) dengan pihak ketiga.

a. Program Jaminan Kesehatan Daerah

Dalam rangka memberikan pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin di rumah sakit, Pemerintah Daerah Kabupaten Klaten menyelenggarakan Program Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda). Program ini dijalankan sejak Tahun Anggaran 2008 sebagai pendamping dari Program Jaminan kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) yang diselenggarakan secara nasional oleh pemerintah pusat.

Tujuan Jamkesda adalah untuk membantu masyarakat miskin di Kabupaten Klaten atas beban biaya pengobatan dan perawatan di rumah sakit. Sasaran program adalah penduduk miskin di Kabupaten Klaten yang tidak masuk dalam daftar peserta Jamkesmas. Program ini dilaksanakan oleh Kepala Dinas Kesehatan selaku pengguna anggaran, bekerja sama dengan 7 (tujuh) rumah sakit di Kabupaten Klaten, Kota Surakarta dan Kota Yogyakarta.

Jumlah penduduk miskin yang diikutsertakan dalam Program Jamkesmas tahun 2008 sebanyak 396.488 orang, dan peserta Jamkesda sebanyak 26.080 orang, diluar peserta program Jamksesmas atau seluruhnya sebanyak 422.568 orang, yaitu 32,58% dari jumlah penduduk Kabupaten Klaten (Berita Daerah Kabupaten Klaten).

b. Kerjasama antar pemerintah daerah se-eks Karesidenan Surakarta.

Pemerintah Daerah Kabupaten Klaten menjadi anggota forum “*Subosukawonosraten*” yang dibentuk bersama dengan pemerintah daerah se-eks Karesidenan Surakarta, meliputi Kota Surakarta, Kabupaten Boyolali, Kabupaten Sukoharjo, Kabupaten Karanganyar, Kabupaten Wonogiri, Kabupaten Sragen, dan Kabupaten Klaten.

Forum tersebut telah mendirikan usaha bersama bernama PT. Solo Raya Promosi yang berdiri pada tanggal 12 Juli 2006. PT Solo Raya Promosi bergerak dibidang jasa, yang memberikan jasa promosi kepada pemerintah daerah yang menjadi anggotanya untuk mempromosikan daerah dan produk-produk unggulan daerahnya masing-masing, termasuk lokasi wisata.

3.8.2. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

Dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2010, dinyatakan bahwa perekonomian Kabupaten Klaten di masa yang akan datang diarahkan menjadi perekonomian daerah yang mandiri dan kreatif, sehingga diperlukan landasan dan struktur perekonomian yang kokoh. Struktur ekonomi tidak hanya didominasi oleh sektor primer, tetapi juga didukung dengan sektor sekunder dan tersier, terutama melalui sektor dan sub sektor andalan dan alternatif pengembangan ekonomi berdasarkan potensi dan kekuatan yang dimiliki. Pada aspek pendapatan daerah, diusahakan untuk mengurangi ketergantungan terhadap dana perimbangan dari pemerintah pusat, dan peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) serta sumber daya lainnya yang diharapkan dapat menjadi kekuatan potensial Kabupaten Klaten di masa yang akan datang. Selain itu, arah kebijakan ekonomi Kabupaten Klaten juga diarahkan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah dan tingkat daya beli masyarakat, serta tetap menjaga stabilitas harga dalam rangka meningkatkan penyediaan barang dan jasa bagi masyarakat.

Untuk mencapai target tersebut, maka laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Klaten dapat dicapai dengan menciptakan kebijakan-kebijakan yang mampu mendorong kebijakan investasi di sektor industri, pertanian, dan perdagangan yang berorientasi ekspor serta pengembangan pariwisata.

Berdasarkan arah kebijakan ekonomi tersebut, maka sasaran ekonomi daerah Kabupaten Klaten pada tahun 2010 adalah:

- Berkurangnya jumlah penduduk miskin;
- Berkurangnya jumlah pengangguran terbuka;
- Terjaganya stabilitas harga;
- Tersedianya investasi untuk pembiayaan pembangunan.

3.8.3. Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Kebijakan keuangan daerah mencakup arah kebijakan pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah.

a. Arah Kebijakan Pendapatan Daerah

Guna mewujudkan peningkatan pendapatan daerah di Kabupaten Klaten, maka beberapa kebijakan dapat dilakukan, antara lain:

- 1). Meningkatkan intensifikasi pendapatan daerah (pajak dan retribusi) dengan manajemen tata kelola pemungutan dan penerimaan sesuai standar baku;
- 2). Meningkatkan ekstensifikasi pendapatan daerah (pajak dan retribusi daerah) sesuai kewenangan kabupaten secara optimal;
- 3). Melakukan deregulasi dan RIA (*Regulatory Investment Assessment*) atas berbagai kebijakan peraturan daerah dan pelaksanaannya yang sudah tidak sesuai dengan perkembangan jaman;
- 4). Memberikan rangsangan ataupun insentif dan meningkatkan pengawasan kepada para pemungut pajak dan retribusi untuk menurunkan inefisiensi dan kebocoran;
- 5). Meningkatkan komunikasi dengan dunia usaha ataupun swasta dalam rangka membangun pemahaman bersama mengenai kewajiban CSR (*Corporate Social Responsibility*) dan hibah swasta dalam pembangunan daerah;
- 6). Mengoptimalkan pendapatan hasil usaha BUMD terhadap PAD pada khususnya dan penerimaan daerah pada umumnya.

b. Arah Kebijakan Penerimaan Pembiayaan Daerah

Kebijakan penerimaan pembiayaan Kabupaten Klaten antarlain diarahkan untuk:

- 1). Menjaga agar keuangan daerah tetap dalam kondisi surplus anggaran, dan apabila terjadi defisit anggaran diusahakan dapat ditutup dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun sebelumnya (SILPA);
- 2). Penerimaan piutang digunakan untuk menganggarkan penerimaan yang bersumber dari penerimaan pihak ketiga.

c. Arah Kebijakan Belanja Daerah

Secara umum, Belanja Daerah Kabupaten Klaten diarahkan untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan peningkatan kualitas pelayanan publik di daerah. Untuk itu, kebijakan-kebijakan yang ditempuh antara lain:

- 1). Meningkatkan proporsi Belanja Langsung pada pos belanja modal dan investasi yang dapat memberikan dampak besar dalam peningkatan roda perekonomian masyarakat dan mempunyai efek ganda (multiplier effect) terhadap aktivitas pada kegiatan-kegiatan kehidupan produktif lainnya;
- 2). Meningkatkan efisiensi dan efektifitas dalam belanja daerah melalui penyusunan Analisa Standar Harga dan Belanja Daerah (ASHBD) dan tolok ukur kinerja serta intensifikasi pengawasan yang dilakukan oleh masyarakat maupun lembaga yang berwenang;
- 3). Meningkatkan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah melalui penyusunan laporan akuntabilitas keuangan oleh setiap SKPD dan meningkatkan pengendalian serta pengawasan kegiatan oleh setiap pimpinan SKPD maupun lembaga yang berwenang;
- 4). Meningkatkan sinkronisasi program dan kegiatan antar SKPD sesuai dengan tupoksinya guna menghindari terjadinya duplikasi anggaran;
- 5). Mengimplementasikan anggaran berbasis kinerja secara terpadu dan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku;
- 6). Menjamin alokasi belanja daerah dengan memberikan skala prioritas yang langsung menyentuh kebutuhan masyarakat.

3.8.4. Kebijakan Pembangunan Kabupaten Klaten Tahun 2010

Pada akhir tahun pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah 2006 – 2010, pemerintah daerah Kabupaten Klaten masih menghadapi beberapa permasalahan strategis seperti berikut ini,

- a. Masih banyaknya penduduk yang rentan terhadap berbagai permasalahan sosial dan berada di bawah garis kemiskinan;
- b. Ketersediaan lapangan kerja belum memadai sehingga angka pengangguran masih cukup tinggi;
- c. Masih rendahnya sumber anggaran yang berasal dari PAD;
- d. Kondisi infrastruktur daerah terutama bidang irigasi masih banyak yang belum memadai;
- e. Pertumbuhan ekonomi antar wilayah masih belum merata;
- f. Masih rendahnya daya saing daerah;
- g. Belum optimalnya pelayanan publik sebagai perwujudan atas supremasi hukum dan perlindungan hukum;
- h. Implementasi dari berbagai peraturan perundangan belum sepenuhnya mampu dilaksanakan untuk mendukung pelaksanaan program otonomi daerah;
- i. Menurunnya kualitas sumber daya alam (SDA) terutama untuk tingkat kesuburan tanah pertanian.

Untuk mengatasi permasalahan diatas, maka kebijakan pembangunan yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Klaten adalah:

- a. Meningkatkan upaya mengurangi angka kemiskinan dan mengurangi kesenjangan pertumbuhan antar wilayah;
- b. Peningkatan pertumbuhan ekonomi dengan memperkuat daya tahan ekonomi dengan peningkatan pembangunan infrastruktur khususnya bidang irigasi, pertanian, industri, dan pariwisata;
- c. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan;
- d. Peningkatan kualitas SDM dan SDA guna mendukung kualitas dan kuantitas pembangunan daerah;
- e. Peningkatan pelayanan publik;
- f. Peningkatan peraihan dana dan kerja sama dengan pihak ketiga untuk pembangunan daerah serta menjadikan tahun kreatif di masa mendatang dalam rangka penggalian sumber dana dan akselerasi pembangunan daerah.

Dalam rangka penjabaran atas kebijakan umum tersebut diatas, strategi pembangunan daerah Kabupaten Klaten pada tahun 2010 diarahkan untuk:

- a. Mempertajam prioritas pembangunan yang berdampak langsung pada peningkatan kesejahteraan masyarakat;
- b. Peningkatan pelaksanaan program pertanian terpadu melalui revitalisasi pertanian;
- c. Peningkatan pelayanan dasar kepada masyarakat;
- d. Memantapkan pelaksanaan program-program otonomi daerah;
- e. Meningkatkan partisipasi dan pemberdayaan masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan;
- f. Peningkatan daya tarik, daya tahan, dan daya saing daerah;
- g. Peningkatan peran serta stakeholder dalam pemberdayaan masyarakat;
- h. Peningkatan upaya untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik (*good governance*).

BAB 4

METODOLOGI

4.1. Langkah Penggunaan Model

Langkah pertama diawali dengan analisis faktor internal dan eksternal. Kemudian dilakukan pendekatan analisis SWOT dengan interaksi matriks IFAS-EFAS, untuk memperoleh beberapa alternatif strategi yang paling sesuai/dominan menurut skala prioritasnya. Terhadap beberapa alternatif strategi yang dihasilkan tersebut, kemudian dilakukan pemilihan skala prioritas kepentingan, diantara permasalahan yang dikemukakan pada setiap levelnya, dengan menggunakan analisis model AHP.

Langkah kedua adalah memilih alternatif strategi kebijakan mana yang harus diprioritaskan dengan menggunakan pendekatan AHP. Hasil analisis AHP inilah yang akan menjadi rekomendasi alternatif strategi kebijakan dalam pengambilan keputusan untuk mencapai tujuan yang diharapkan.

4.2. Analisis SWOT

Tahapan-tahapan dalam melakukan analisis SWOT dilakukan sebagai berikut:

4.2.1. Identifikasi Faktor-Faktor Internal Dan Eksternal

Tahap pertama dalam analisis SWOT adalah melakukan identifikasi terhadap faktor-faktor internal dan eksternal di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Klaten yang dianggap berpengaruh secara positif maupun secara negatif dalam merencanakan dan melaksanakan pembangunan daerah. Tahap ini sangat penting karena hasil dari identifikasi ini akan menjadi dasar untuk kegiatan analisis berikutnya. Identifikasi faktor-faktor internal dan eksternal ini dilakukan dengan mempelajari dokumen-dokumen, kajian literatur, berita-berita yang dimuat di media lokal, dan melakukan survey pendahuluan di lingkungan pemerintah daerah Kabupaten Klaten.

4.2.2. Penyusunan Kuisisioner

Setelah faktor-faktor internal dan eksternal telah teridentifikasi, kemudian disusun sebuah kuisisioner sebagai sarana untuk mendapatkan penilaian dari responden terhadap faktor-faktor yang telah dirumuskan. Penilaian terhadap faktor-faktor yang telah diidentifikasi dibagi menjadi 2 bagian, yaitu:

1. Penilaian terhadap prestasi faktor.

Penilaian pada tahap ini diberikan skala antara 1 sampai dengan 9, yang mempunyai arti sebagai berikut:

- Skala 1 berarti amat sangat buruk;
- Skala 2 berarti sangat buruk;
- Skala 3 berarti buruk;
- Skala 4 berarti sedikit buruk;
- Skala 5 berarti sedang/netral;
- Skala 6 berarti sedikit baik;
- Skala 7 berarti baik;
- Skala 8 berarti sangat baik;
- Skala 9 berarti amat sangat baik.

2. Penilaian urgensi (tingkat kepentingan) terhadap penanganan faktor-faktor.

Penilaian pada tahap ini diberikan skala a sampai dengan d, yang mempunyai arti sebagai berikut:

- Skala a berarti sangat penting untuk dilakukan penanganan;
- Skala b berarti penting untuk dilakukan penanganan;
- Skala c berarti kurang penting untuk dilakukan penanganan;
- Skala d berarti tidak penting untuk dilakukan penanganan.

4.2.3. Penentuan responden

Setelah kuisisioner selesai disusun, maka tahap berikutnya adalah penentuan responden yang akan mengisi kuisisioner tersebut. Penentuan responden dilakukan dengan mempertimbangkan keahlian dan keterkaitan calon responden dengan permasalahan yang akan diteliti.

Pemilihan responden ditetapkan secara *purposive*, atau ditetapkan langsung berdasarkan pengetahuan yang mereka miliki mengenai permasalahan yang sedang diteliti. Adapun responden yang diminta melakukan penilaian faktor-faktor internal dan eksternal dalam kuisisioner SWOT dibagi menjadi 2 kelompok:

1. Dari sisi pemerintah daerah. Dari kelompok ini, responden yang mengisi kuisisioner adalah dari SKPD Bappeda sebanyak 5 responden, Sekretariat Daerah 2 responden, Dinas Perindagkop 7 responden, DPPKAD 3 responden;
2. Dari sisi akademisi. Dari kelompok ini terdapat 3 responden yang mengisi kuisisioner, yaitu Dekan dan 2 orang dosen dari Fakultas Ekonomi Universitas Widyadharma

Jumlah total responden yang melakukan penilaian/pengisian kuisisioner adalah sebanyak 20 responden, yang apabila dilihat dari segi pendidikan dapat dikelompokkan sebagai berikut:

- Pendidikan S2 : 15 responden
- Pendidikan S1 : 5 responden

Dari ke dua puluh responden tersebut, terdiri dari 15 responden pria, dan 5 responden wanita (Daftar responden dapat dilihat pada lampiran 1).

4.2.4. Analisis Data

Setelah pengisian kuisisioner, maka akan didapatkan persepsi ahli atas faktor-faktor internal dan eksternal yang ada di lingkungan pemerintah daerah Kabupaten Klaten, sehingga kemudian akan didapatkan tabel indikator faktor-faktor intern dan ekstern, seperti yang dijelaskan pada tabel 4.1.

Dari penilaian terhadap faktor-faktor internal dan eksternal, langkah selanjutnya adalah melakukan identifikasi unsur-unsur yang dikategorikan sebagai kekuatan (*strength*), kelemahan (*weakness*), kesempatan dan peluang (*opportunity*) yang dimiliki oleh pemerintah daerah Kabupaten Klaten.

Tabel 4.1 Indikator Faktor dalam SWOT

| Penilaian Terhadap Indikator-Indikator Faktor Internal dan Eksternal | |
|--|------------------|
| Faktor Internal | Faktor eksternal |
| Faktor 1 | Faktor 1 |
| Faktor 2 | Faktor 2 |
| Faktor 3, dst | Faktor 3, dst |

Sumber: Soesilo (2002)

Setelah faktor-faktor internal dikelompokkan menjadi kekuatan dan kelemahan, dan faktor-faktor eksternal dikelompokkan menjadi peluang dan ancaman, langkah selanjutnya adalah melakukan pembobotan IFAS – EFAS elemen-elemen SWOT dengan cara sebagai berikut:

- Setiap nilai rata-rata horizontal dikurangi nilai 5 (lima) sebagai nilai dari persepsi/pendapat responden yang lebih adil atas pembagian faktor internal menjadi *strength* dan *weakness*, dan faktor eksternal menjadi *opportunity* dan *threat*. Nilai 5 (lima) diambil sebagai patokan (*benchmark*) yang berkorelasi netral terhadap sasaran. Nilai yang dihasilkan kemudian disebut sebagai penyesuaian nilai rata-rata;
- Nilai penyesuaian bersifat nilai mutlak;
- Penentuan bobot dari masing-masing elemen SWOT untuk setiap faktornya dengan mengambil bobot masing-masing faktor = 100%. Bobot total dari setiap elemen SWOT menggambarkan total nilai penyesuaian rata-rata terhadap nilai total faktornya masing-masing;
- Pembobotan yang dipakai sebagai bahan penilain prioritas adalah bobot tertimbang yang diperoleh dari perkalian antara bobot x rating. Rating diperoleh dari nilai urgensi penanganan/skala prioritas kepentingan, sesuai dengan urutan level: huruf a = 4; b = 3; c = 2; d = 1.

4.2.5. Perumusan Strategi

Untuk mendapatkan prioritas dan keterkaitan antar strategi, maka dari hasil pembobotan IFAS-EFAS kuisisioner SWOT untuk masing-masing indikator tersebut, dilakukan interaksi kombinasi dari strategi yang meliputi kombinasi internal-eksternal, yang terdiri dari:

1. Strategi *Strength-Opportunity* (SO); Interaksi kombinasi strategi SO: yaitu suatu strategi yang menggunakan kekuatan untuk memanfaatkan peluang;
2. Strategi *Strength-Threat* (ST); Interaksi kombinasi strategi ST: yaitu suatu strategi yang menggunakan kekuatan untuk mengatasi ancaman;
3. Strategi *Weakness-Opportunity* (WO); Interaksi kombinasi strategi WO: yaitu suatu strategi yang meminimalkan kelemahan untuk memanfaatkan peluang;
4. Strategi *Weakness-Threat* (WT) Interaksi kombinasi strategi WT: yaitu suatu strategi yang meminimalkan kelemahan untuk mengatasi ancaman.

Tabel 4.2 Matriks Faktor Internal dan Eksternal

| | | FAKTOR EKSTERNAL | |
|--------------------|--------------|------------------|-------------|
| | | OPPORTUNITY (O) | THREAT (T) |
| FAKTOR INTERNAL | STRENGTH (S) | Strategi SO | Strategi ST |
| | WEAKNESS (W) | Strategi WO | Strategi WT |

Sumber: Nining I. Soesilo, 2002

Dari matriks tersebut akan diperoleh 4 pilihan strategi yang dapat diambil oleh *decision maker* sebagai strategi pilihan yang tentu saja ditentukan setelah mempertimbangkan potensi, kondisi dan kendala yang ada.

Kemudian dari interaksi strategi tersebut akan didapatkan Matriks SWOT – Interaksi IFAS – EFAS seperti yang dijelaskan pada tabel 4.3.

Tabel 4.3 Matriks SWOT – Interaksi IFAS – EFAS

| | Kekuatan (S) | Kelemahan (W) |
|-------------|--|--|
| Peluang (O) | <p><u>Strategi SO</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Strategi yang memaksimalkan kekuatan untuk memanfaatkan peluang yang ada; ▪ Strategi agresif; ▪ Keunggulan komparatif. | <p><u>Strategi WO</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Strategi yang meminimalkan kelemahan untuk memanfaatkan peluang; ▪ Strategi orientasi putar balik; ▪ Investasi/disvestasi. |
| Ancaman (T) | <p><u>Strategi ST</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Strategi yang memaksimalkan kekuatan untuk mengatasi ancaman; ▪ Strategi diversifikasi; ▪ Mobilisasi. | <p>Strategi WT</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Strategi yang meminimalkan kelemahan untuk mengatasi ancaman; ▪ Strategi defensif; ▪ Kontrol kerusakan/Strategi riskan. |

Sumber: Nining I. Soesilo, 2002

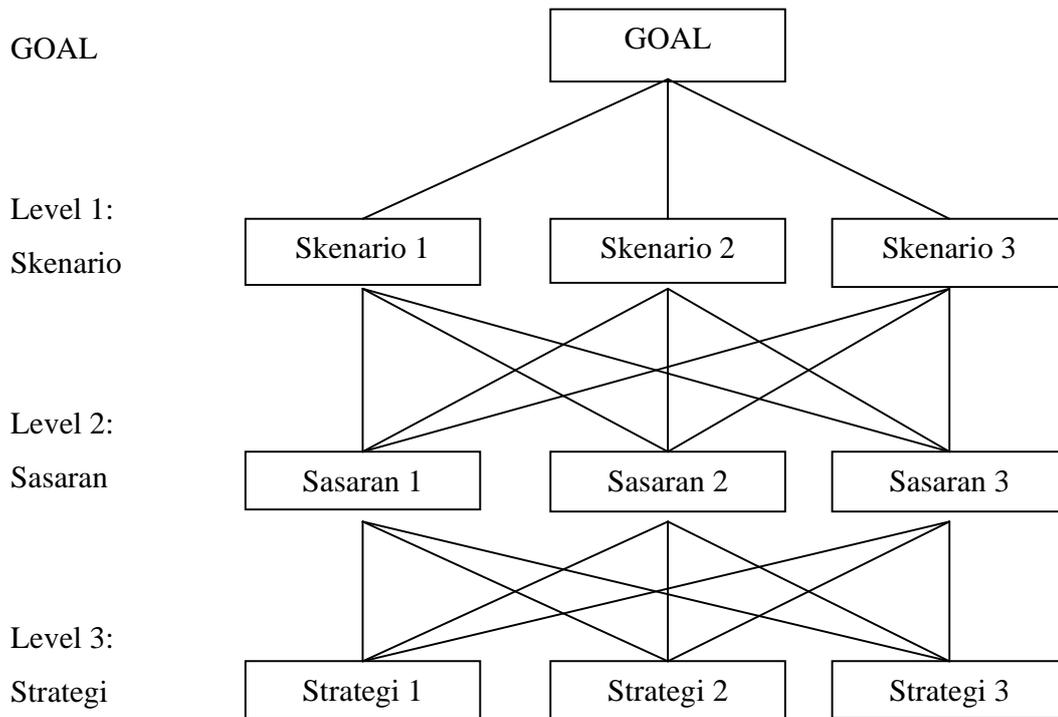
4.3. Analytical Hierarchy Process

Ciri pemecahan model AHP adalah menggunakan hirarki yang menguraikan permasalahan yang kompleks menjadi elemen-elemen yang lebih sederhana. Hirarki dari metode ini dapat dibagi menjadi Goal, Skenario, Sasaran, dan Strategi.

4.3.1. Prinsip Penyusunan Hirarki

Dalam penelitian ini, hirarki yang akan digunakan dalam menentukan kebijakan pembangunan daerah yang terbaik adalah hirarki yang terdapat pada

diagram 4.1. Alternatif strategi yang digunakan merupakan hasil dari analisis SWOT yang telah dilakukan sebelumnya.



Gambar 4.1 Penyusunan Hirarki Model AHP

4.3.2. Penyusunan Kuisisioner dan Responden

Pengisian kuisisioner bertujuan untuk menjangkau persepsi responden sebagai *expert* untuk menghasilkan data primer. Penggunaan kuisisioner ini dipilih karena cara konsensus, yaitu dengan mengumpulkan para responden secara bersamaan dalam tempat dan waktu yang sama, sangat sulit untuk dilakukan. Responden dipilih berdasarkan partisipasi aktif dalam perencanaan pembangunan, dan pengetahuan serta pemahaman responden terhadap permasalahan yang sedang diteliti.

Penentuan jumlah *expert* yang disyaratkan sebagai responden untuk memberikan penilaian pada kuisisioner AHP sebenarnya sangat relatif. Satu orang yang benar-benar menguasai permasalahan bisa saja memberikan hasil yang lebih baik

daripada penilaian banyak responden yang tidak terlalu memahami permasalahan. Namun, apabila respondennya terlalu sedikit, dan apabila penilaian yang diberikan bias, maka hasil analisis secara keseluruhan akan menjadi kurang baik. Untuk menghindari hal tersebut, maka *expert* yang dipilih jumlahnya tidak terlalu sedikit, sehingga apabila ada penilaian yang agak janggal dapat dinetralkan dengan penilaian rata-rata sejumlah *expert*.

Pada penelitian ini, *expert* yang diminta untuk menjadi responden kuisisioner AHP sebanyak 7 orang, yaitu, pejabat-pejabat pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Klaten, dosen-dosen pada Fakultas Ekonomi Universitas Widya Dharma Klaten, dan tokoh masyarakat. (Daftar responden AHP dapat dilihat pada lampiran 3).

4.3.3. Penilaian Kuisisioner AHP

Penilaian responden atas kuisisioner AHP dilakukan dengan memberikan penilaian dari skala 1 sampai 9, dengan penjelasan seperti pada tabel 4.4.

Tabel 4.4 Skala Perbandingan Secara Berpasangan

| Skala | Artinya | Keterangan |
|-------|--|--|
| 1 | Kedua elemen sama pentingnya (<i>equal importance</i>) | Kedua elemen yang diperbandingkan memberikan kontribusi yang sama besar untuk mencapai tujuan. |
| 3 | Elemen yang satu sedikit lebih penting dari elemen yang lainnya (<i>moderate importance</i>) | Pengalaman dan penilaian agak sedikit menyukai sebuah elemen daripada elemen lainnya. |
| 5 | Elemen yang satu lebih penting dari elemen yang lainnya (<i>essential/ strong importance</i>) | Pengalaman dan penilaian lebih kuat menyukai sebuah elemen daripada elemen lainnya. |

(Sambungan)

| Skala | Artinya | Keterangan |
|---------|--|---|
| 7 | Elemen yang satu sangat lebih penting dari elemen yang lainnya (<i>very strong importance</i>) | Sebuah elemen sangat lebih disukai daripada elemen yang lainnya, dominasinya terlihat nyata dalam keadaan yang sebenarnya |
| 9 | Elemen yang satu mutlak lebih penting dari elemen yang lainnya (<i>extreme importance</i>) | Sebuah elemen mutlak lebih kuat disukai dari yang lainnya dan berada pada tingkat tertinggi. |
| 2,4,6,8 | Merupakan angka kompromi diantara penilaian diatas | Bila kompromi diperlukan diantara dua pertimbangan/penilaian. |

Sumber: Saaty (1986)

4.3.4. Perumusan Strategi

Pengolahan data dengan metode AHP ini dilakukan dengan memberikan bobot kepada masing-masing responden. Pemberian bobot ini didasarkan pada pengetahuan atau pengalaman para responden dalam melakukan perencanaan pembangunan daerah di Kabupaten Klaten. Adapun pemberian bobot masing-masing responden dijelaskan pada tabel 4.5.

Tabel 4.5 Pembobotan Responden

| Nama | Jabatan | Unit Kerja | Bobot |
|-------------|--|--------------------|-------------|
| Responden 1 | Kabid. Perencanaan Ekonomi | Bappeda | 0,20 |
| Responden 2 | Kabid. Perencanaan Fisik dan Prasarana | Bappeda | 0,20 |
| Responden 3 | Kabid. Pendapatan, Evaluasi, dan Litbang | Bappeda | 0,20 |
| Responden 4 | Kasubid Pemerintahan dan kependudukan | Bappeda | 0,20 |
| Responden 5 | Dekan Fakultas Ekonomi | Univ. Widya Dharma | 0,08 |
| Responden 6 | Dosen Fakultas Ekonomi | Univ. Widya Dharma | 0,08 |
| Responden 7 | Tokoh Masyarakat/pengamat pembangunan | NA | 0,04 |
| | Total | | 1,00 |

Responden yang berasal dari unit kerja Bappeda diberi pembobotan paling besar karena mereka adalah orang-orang yang berperan secara aktif dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah, dan dianggap memiliki pengetahuan yang cukup mendetail mengenai permasalahan yang dihadapi Kabupaten Klaten dalam rangka melaksanakan pembangunan.

4.3.5. Pengolahan Data

Pengolahan data dalam metode AHP ini akan dilakukan dengan menggunakan *software Expert Choice 2000 2nd edition*.